APSSI

Kecerdasan Sosial Mengelola Konflik

Seri Konflik Industrial, Politik dan Demokratisasi

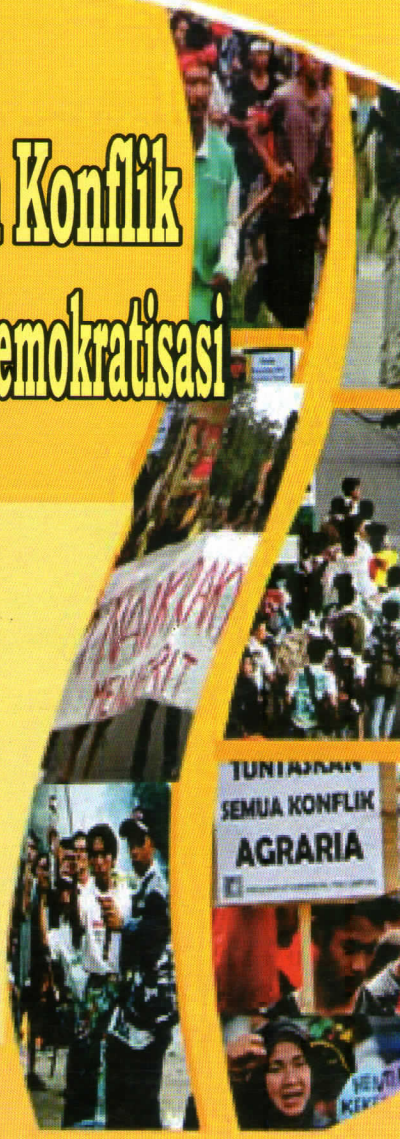

Prolog

DR. (HC) Sri Sultan Hamengku Buwono X

Prosiding

Konferensi Nasional Sosiologi 1

Palembang, April 2013

ASOSIASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI INDONESIA
PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Ketentuan Pidana
Kutipan pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang HAK CIPTA :

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KECERDASAN SOSIAL MENGELOLA KONFLIK : SERI KONFLIK INDUSTRIAL, POLITIK DAN DEMOKRATISASI

Palembang : Unsri Press 2013
Setting & Lay Out Isi : Maryati, A.Md
Cetakan Pertama Mei 2013
xxviii +264 halaman : 24 x 16 cm

Diterbitkan Oleh :
Penerbit Universitas Sriwijaya Palembang
Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telpon 0711- 360969-373422, Fax. 0711- 360969
Email : **unsri.press@yahoo.com**
Website : **www.unsripress.unsri.ac.id**

Hak Cipta @ 2013 pada Penulis/Penyusun
Hak Penerbitan Pada Unsri Press

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit

ISBN : 979-587-479-9

Kata Pengantar

Alhamdulillah, Konferensi Nasional Sosiologi pertama dengan tema Kecerdasan Sosial Dalam Mengelola Konflik, telah sukses dilaksanakan di Kota Palembang pada tanggal 23-25 April 2013. Penyelenggaraan konferensi yang dihadiri lebih 90 orang dari lura Kota Palembangi merupakan wujud program kerjasama Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) dan Program Magister Sosiologi Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Konferensi ini menghadirkan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai pembicara Kunci dan 3 orang pemakalah utama pada sesi Pleno, masing-masing Dr. Muhammad Najib Azca mewakili akademisi (Sosiologi UGM), Dr. Imam Prasojo mewakili Aktifis (Nurani Dunia) dan Drs. Marjono, MM mewakili Praktisi (BNP2TKI).

Panitia konferensi nasional sosiologi perdana ini telah menerima 50 makalah yang terdiri dari 6 klaster, yaitu: 1) Konflik Sumber Daya Alam 13 makalah; 2) Konflik Komunal 11 makalah; 3) Konflik politik dan demokratisasi 5; 4) Konflik Industrial 8 makalah; 5) Konflik Gender 6 makalah dan 6) Konflik dan kekerasan kaum muda 7 makalah. Keenam klaster ini kemudian di kelompokkan menjadi 4 buku prosiding. Buku Pertama, Konflik Kekerasan Kaum Muda dan Konflik Gender; Buku kedua Konflik Industrial dan Konflik Politik-Demokratisasi; Buku ketiga, Konflik Komunal dan Buku Keempat Konflik Sumber Daya Alama (SDA).

Adapun tujuan dari Konferensi Nasional Sosiologi I adalah:

a. Memetakan berbagai jenis konflik, skala lokal, national dan internasional
b. Merumuskan resolusi konflik dan manajemen konflik untuk penyelesaian konflik tersebut.
c. Mendorong partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara cerdas, elegan, dan berkeadaban.

Konflik memang merupakan sebuah keniscayaan bagi masyarakat manapun. Apalagi bagi masyarakat multietnis seperti Indonesia. Keragaman dan keunikan kultur membuat bangsa ini menjadi kaya secara sosial budaya. Namun demikian, kekayaan itu bisa menimbulkan potensi konflik yang luar biasa, lantaran perbedaan sudut pandang dalam memaknai sesuatu dan mungkin saja hal tersebut berujung pada

persengketaan. Terlebih, jika perbedaan itu justru dibingkai oleh stigma superioritas-imperioritas. Bahkan dalam masyarakat yang amat homogen sekalipun, selalu saja ada potensi konflik. Perbedaan kepentingan, orientasi, selera, keinginan, pandangan dan lainnya dapat memicu konflik yang mungkin pada mulanya berskala kecil, tetapi kalau masyarakat tersebut tidak cerdas menyikapi dan mengelolanya hal tersebut akan menjadi petaka kemanusiaan.

Benturan itu lumrah terjadi, mengingat karakter manusia dan setiap masyarakat diciptakan dengan banyak perbedaan. Setiap individu dan masyarakat memiliki sejarah dan karakternya yang unik. Selain itu, dalam diri setiap individu memiliki nilai-nilai yang memandu perilaku dan pikirannya, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat peluang untuk terjadi suatu konflik sosial sangatlah besar. Dengan kata lain, konflik juga bisa dipahami sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik juga bisa timbul sebagai akibat ketidakseimbangan hubungan (kesenjangan sosial, perbedaan status sosial, akses sumber daya, dan kekuasaan).

Dalam konteks Indonesia, konflik seringkali berujung pada kekerasan, baik di tataran tindakan, perkataan, sikap, bahkan dalam wujud struktur dan sistem yang memungkinkan kekerasan itu terlegitimasikan. Dapat disaksikan betapa kekerasan itu senantiasa menghiasi lembaran sejarah bangsa ini. Mulai dari konflik Aceh, Papua, Sampit, Poso, bahkan sampai pada konflik di Balinuraga Lampung Selatan, yang kesemuanya menyebabkan kematian secara masal. Jelas, konflik tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial, konstruksi nilai-nilai, bahkan pemaknaan terhadap kelompok lain. Berkenaan dengan hal ini, menarik untuk mengingat sebuah ungkapan, bahwa kekerasan merupakan buntut dari ketidakpuasan yang menumpuk.

Namun demikian, hal itu bukan berarti bahwa konflik harus terus dibiarkan mencari jalannya sendiri. Kita sebagai anggota masyarakat yang beradab tetap berkewajiban untuk mencari solusi terhadap konflik tersebut, apapun bentuk dan latarnya. Konflik hadir tidak sebagai tontonan, tetapi sebagai ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk membangun kecerdasannya, untuk mengkomunikasikan kepentingannya, untuk menegosiasikan kebutuhannya, bahkan untuk mengekspresikan jati dirinya sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, apapun jenis kelaminnya, apapun agamanya, apapun pekerjaannya.

Akhir-akhir ini eskalasi konflik dalam masyarakat intensitasnya semakin tinggi, petanya semakin meluas, dan ketampakannya semakin nyata. Sebut saja beberapa diantaranya, yaitu kasus Sampang (konflik agama-komunal), Sumbawa (etnis-agama), Mesuji (lahan-ekonomi), Lampung (etnis ekonomi), dan Makassar (politik identitas). Tentu tidak mudah untuk mengidentifikasi sejumlah konflik tersebut. Beberapa diantaranya merupakan akumulasi dari sejumlah persoalan, namun tidak sedikit diantaranya yang hanya dipicu oleh persoalan sederhana kalau tidak dapat dikatakan sepele.

Yang menjadi problem sebenarnya, tidak terletak pada konflik itu sendiri, tetapi pada kemampuan kita untuk mengelolanya agar konflik tersebut tidak meluas, dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik justru diharapkan menjadi sarana meningkatnya kecerdasan sosial dan kecakapan bermasyarakat (*sociability*). Pada sisi lain, ada banyak konflik yang berakhir bukan karena adanya penyelesaian yang adil, melainkan lantaran adanya satu pihak yang mengalah demi menghindari korban yang lebih besar. Di sini, penting terbangunnya sistem sosial yang memungkinkan keadilan distributif sumber daya terlembagakan, agar penyelesaian konflik tersebut tidak bersifat semu melainkan telah bercorak substansial.

Dalam konteks itulah kita sangat membutuhkan apa disebut sebagai kecerdasan sosial mengelola konflik, justru karena semakin tingginya tingkat kompetisi antar kelompok dan anggota masyarakat dalam memperebutkan ruang kehidupan, terutama di ranah ekonomi dan ranah politik. Dua ranah tersebut adalah yang paling besar kontribusinya terhadap berbagai tipe dan dinamika konflik di dalam masyarakat Indonesia. Sekalipun dalam petampakan seringkali dua tipe konflik tersebut dipahami sebagai konflik agama atau pemeluk agama, namun dibalik dari itu ternyata adalah konflik politik dan atau ekonomi.

Oleh karena itu, konferensi yang bertemakan kecerdasan sosial mengelola konflik merupakan sebuah keniscayaan seiring dengan tumbuh, mengeskalasi, dan meluasnya konflik itu sendiri. Kecakapan bermasyarakat (*sociability*) dalam mengelola konflik itu memang perlu dibangun. Agar, penyelesaian konflik tidak bersifat semu dan sementara, tetapi berwatak substantif dan berkeadilan. Sebagai contoh, kita amat membutuhkan lembaga arbitrase, rekonsialisi, atau apapun namanya yang memiliki komitmen dan integritas tinggi serta berketeguhan hati untuk selalu membangun komunikasi sosial dalam menyelesaikan konflik secara cerdas, elegan, dan berkeadaban. Maka bila kita telah memiliki

kecerdasan sosial tersebut, segala bentuk perbedaan, persaingan, dan intrik tidak selalu berujung pada konflik kekerasan. Justru, hal tersebut dapat ditransformasikan sebagai pendorong sekaligus ruang untuk memperkuat kecakapan bermasyarakat, berbagsa dan bernegara.

Demikian pengantar buku prosiding dari panitia, diharapkan ke depan Konferensi Nasional Asosiasi Program Studi Sosiologi akan semakin baik. Kepada semua pihak yang membantu kelancaran pelaksanaan konferensi ini diucapkan terima kasih, baik kepada Sri Sultan Hamengkubowono X sebagai pembicara utama, Gubernur Sumatera Selatan Ir. H. Alex Noerdin sebagai pembuka acara konferensi, Rektor Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Badia perizade, MBA dan Ketua Umum APSSI Dr. Muhammad Najib Azca sebagai pembawa sambutan, serta kepada semua peserta dan panitia diucapkan terima kasih. Semoga sumbangsihnya mulai persiapan sampai pelaksanaan konferensi diterima sebagai pahala disisi Allah SWT. Amien.

Palembang, 8 Mei 2013
Panitia Konferensi Nasional Sosiologi I

DR. M. Ridhah Taqwa
Ketua Umum

Kata Sambutan

Konferensi Nasional Sosiologi I yang diselenggarakan oleh Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) bekerjasama dengan Magister Sosiologi Universitas Sriwijaya di Palembang pada tanggal 23-25 April 2013 akan menjadi momen yang terus dikenang dalam perjalanan sosiologi di Indonesia karena, sekurangnya, dua alasan. Pertama, karena ini adalah ayunan langkah pertama yang dilakukan oleh APSSI dalam menyelenggarakan perhelatan akademik sosiologi di bumi Nusantara yang diikuti oleh para peserta dari berbagai penjuru di tanah air. Sampai kapanpun rangkaian acara Konferensi APSSI akan berjalan, acara perdana ini tak akan terhapus dari catatan sejarah. Kedua, karena pilihan temanya yang sangat relevan dengan tantangan dan problema social kontemporer di Indonesia di era yang lazim disebut sebagai "zaman reformasi", yaitu: bertema "Kecerdasan Sosial dalam Mengelola Konflik". Meski jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kekerasan pada fase awal "zaman reformasi," hingga kini bumi khatulistiwa ini masih juga dirundung berbagai tragedy kekerasan yang terkadang bisa mengancam nasib reformasi itu sendiri, terutama ketika Negara justru absen ketika gejolak dan amuk massa terjadi di sejumlah sudut negeri ini.

Selain dua alasan empirik tersebut, pilihan tema konflik dan kekerasan tersebut juga seiring dengan perkembangan teoritik di ranah sosiologi global. Saya teringat dengan tulisan guru besar sosiologi di Universitas Lancaster Inggris, Sylvia Walby, berjudul "Violence and society: an emerging field of sociology" yang dimuat dalam *Current Sociology* (2013, 61: 95). Dalam tulisan yang merupakan pendahuluan dalam sebuah monografi yang diterbitkan dari kumpulan artikel yang dipresentasikan dalam *plenary session* bertopik kekerasan yang diselenggarakan dalam konferensi International Sociological Association (ISA) di Gottenborg pada tahun 2010, Profesor Walby beragumen bahwa kekerasan dan masyarakat merupakan sebuah ranah yang sedang berkembang dalam disiplin sosiologi dewasa ini.

Meski kadang dipinggirkan dalam kajian-kajian sosiologi, kekerasan acap muncul dalam analisis ihwal kehidupan keseharian maupun dalam momen-momen besar perubahan social. Menurutnya, cara-cara baru kemunculan kekerasan telah menggoyahkan gagasan-

Kata Sambutan

Konferensi Nasional Sosiologi I yang diselenggarakan oleh Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) bekerjasama dengan Magister Sosiologi Universitas Sriwijaya di Palembang pada tanggal 23-25 April 2013 akan menjadi momen yang terus dikenang dalam perjalanan sosiologi di Indonesia karena, sekurangnya, dua alasan. Pertama, karena ini adalah ayunan langkah pertama yang dilakukan oleh APSSI dalam menyelenggarakan perhelatan akademik sosiologi di bumi Nusantara yang diikuti oleh para peserta dari berbagai penjuru di tanah air. Sampai kapanpun rangkaian acara Konferensi APSSI akan berjalan, acara perdana ini tak akan terhapus dari catatan sejarah. Kedua, karena pilihan temanya yang sangat relevan dengan tantangan dan problema social kontemporer di Indonesia di era yang lazim disebut sebagai "zaman reformasi", yaitu: bertema "Kecerdasan Sosial dalam Mengelola Konflik". Meski jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kekerasan pada fase awal "zaman reformasi," hingga kini bumi khatulistiwa ini masih juga dirundung berbagai tragedy kekerasan yang terkadang bisa mengancam nasib reformasi itu sendiri, terutama ketika Negara justru absen ketika gejolak dan amuk massa terjadi di sejumlah sudut negeri ini.

Selain dua alasan empirik tersebut, pilihan tema konflik dan kekerasan tersebut juga seiring dengan perkembangan teoritik di ranah sosiologi global. Saya teringat dengan tulisan guru besar sosiologi di Universitas Lancaster Inggris, Sylvia Walby, berjudul "Violence and society: an emerging field of sociology" yang dimuat dalam *Current Sociology* (2013, 61: 95). Dalam tulisan yang merupakan pendahuluan dalam sebuah monografi yang diterbitkan dari kumpulan artikel yang dipresentasikan dalam *plenary session* bertopik kekerasan yang diselenggarakan dalam konferensi International Sociological Association (ISA) di Gottenborg pada tahun 2010, Profesor Walby beragumen bahwa kekerasan dan masyarakat merupakan sebuah ranah yang sedang berkembang dalam disiplin sosiologi dewasa ini.

Meski kadang dipinggirkan dalam kajian-kajian sosiologi, kekerasan acap muncul dalam analisis ihwal kehidupan keseharian maupun dalam momen-momen besar perubahan social. Menurutnya, cara-cara baru kemunculan kekerasan telah menggoyahkan gagasan-

gagasan lama tentang watak dan arah kekerasan; menentang asumsi-asumsi bahwa mereka yang papa lebih cenderung melakukan kekerasan dibandingkan mereka yang berkuasa dan bahwa modernitas semakin kurang mengandalkan kekerasan (*less violent*). Menurut *Chair* dalam studi gender UNESCO tersebut, riset-riset mutakhir mengenai kekerasan terhadap perempuan dan kelompok-kelompok minoritas di bagian dunia sebelah Selatan memberi alasan kuat untuk memasukkan kekerasan sebagai sebuah isu pokok dalam sosiologi.

Mengikuti presentasi berbagai paper bertopik konflik dan kekerasan yang disajikan dalam konferensi tersebut, saya merasa senang dan optimistis bahwa studi konflik dan kekerasan yang dilakukan oleh kolega sosiolog dari berbagai universitas di Indonesia akan berkembang pesat dengan pengkayaan empirik maupun teoritik yang bermakna. Hal ini terutama karena melihat antusiasme dan energy segar yang dikerahkan oleh para sosiolog tersebut untuk mengkaji fenomena kompleks dan menarik di berbagai penjuru di tanah air. Misalnya dari "Konflik Nelayan dan Sumber Daya Laut di Teluk Palu Kota Palu Sulawesi Tengah" oleh Dr. Haslinda B. Andriani, M.Si (Prodi Sosiologi Universitas Tadulako Palu) hingga "Pemetaan Konflik yang Terjadi Akibat Eksploitasi Batubara di Propinsi Bengkulu" oleh Lesti Heriyanti (Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu); dari "Konflik Keagamaan di Madura: Studi terhadap Kasus Konflik Syi'ah-Sunni di Sampang Madura" oleh Iskandar Dzulkarnain (Sosiologi Universitas Trunojoyo) sampai "Konflik Etnik di Kalimantan Dalam Format Keserasian Sosial" oleh Prof. Dr. Hj. Nur Fitriyah, M.S (Universitas Mulawarman Samarinda); dari "Anatomi Tawuran Antar Kelompok Pemuda di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat" oleh Daisy Indira Jasmine (Departemen Sosiologi FISIP UI) hingga "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Kelurahan Oesapa Kota Kupang" oleh Balkis Soraya Tanof (Sosiologi FISIP UNDANA Kupang – NTT); dari "Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Kasus Lumpur Lapindo" oleh Dr. Anis Farida (Universitas Wijaya Kesuma, Surabaya) sampai "Belajar Dari Konflik dan Damai Aceh" oleh Dr. M Nazaruddin (Prodi Sosiologi Fisip Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh). Itu sekadar ilustrasi betapa kayanya kasus konflik yang dibedah dan didiskusikan dalam Konferensi Nasional Sosiologi 1 APSSI di Palembang lalu.

Saya sendiri 'terjerumus' dalam studi konflik melalui keterlibatan saya sebagai peneliti di Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM) sejak 1996. Itu merupakan periode

ketika kekerasan social mulai marak terjadi, sebuah simtom yang kelak difahami sebagai pertanda menjelang terjadi perubahan rezim dan transisi politik dari otoritarianisme menuju demokrasi. Keterlibatan saya dalam studi konflik dan kekerasan semakin intensif ketika saya mulai menempuh program studi master di Australian National University (ANU) pada tahun 2001-2003 dan menulis tesis mengenai peranan aparat keamanan dalam konflik komunal-agama di Ambon, Maluku. Pada saat yang sama PSKP UGM tergabung dalam jejaring studi konflik di Asia Tenggara bernama South East Asia Conflict Studies Network (SEA-CSN) yang berpusat di Penang, Malaysia. Saat ini bersama kolega dosen di Jurusan Sosiologi UGM saya mengampu mata kuliah bertajuk *Conflict, Peace and Development* yang tergabung dalam Global Peace Campus Program (GCP) yang diinisiasi oleh Tokyo University of Foreign Studies (TUFS) dan melibatkan sejumlah universitas di Kamboja, Srilanka dan India (termasuk di wilayah konflik Kashmir). Ringkasnya, saya membayangkan dan yakin bahwa studi konflik dan kekerasan (juga studi perdamaian, jika kita melihatnya dari penjuru yang lain) akan berkembang pesat sebagai salah satu cabang kajian maupun dalam pengajaran dalam disiplin sosiologi di Indonesia dan akan menyumbangkan bagi pengembangan studi dengan focus serupa di ranah regional maupun global.

Apalagi Indonesia memang merupakan salah satu 'laboratorium' studi konflik, kekerasan dan perdamaian yang menyediakan ladang pengkajian yang kaya, berdimensi luas dan amat bervariasi. Dengan rentang geografis yang lebar, dengan tingkat keragaman suku, bangsa dan bahasa yang luar biasa, serta dengan penerapan desentralisasi system politik pada periode pasca "orde baru", Indonesia menyajikan beraneka kasus konflik, peristiwa kekerasan maupun ikhtiar membangun dan melestarikan perdamaian. Kebetulan ada program pembuatan data base konflik kekerasan di Indonesia bernama Violent Conflict in Indonesia Study (ViCIS), yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data melalui koran local di berbagai daerah di Indonesia dalam periode 1998-2008.[1] Mengklaim sebagai salah satu data set mengenai konflik kekerasan terbesar di dunia, ViCIS mengumpulkan semua data insiden kekerasan

[1] Data ViCIS dikelola menjadi proyek Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan (Kemenko Kesra) dengan dukungan Bank Dunia dan The Habibie Center dan sebagian datanya bisa diakses melalui laman www.snpk-indonesia.com. Data mentah dalam bentuk rekaman citra (foto) dari setiap halaman dari koran lokal tersebut tersedia dan direncanakan bisa diakses oleh public melalui sejumlah fasilitas yang disediakan di lembaga pemerintah dan universitas.

konflik (baik kekerasan maupun nir-kekerasan) maupun kekerasan criminal yang dilaporkan di berbagai koran lokal di 22 provinsi di Indonesia. Meskipun penggunaan koran sebagai sumber data mengenai konflik kekerasan memiliki sejumlah kelemahan, namun dengan ketakersediaan berbagai sumber lain yang *reliable* membuat data set ViCIS sangat berguna bagi riset-riset konflik kekerasan di Indonesia. Mengingat problem yang acap terjadi di Indonesia adalah lemahnya pemanfaatan sumber-sumber data yang tersedia (*under utilization)*, maka pemafaatan data-data tersebut untuk studi-studi konflik dan kekerasan merupakan salah satu agenda penting bagi pengembangan studi konflik, kekerasan dan perdamaian di Indonesia. APSSI bisa berperan dalam melaksanakan pelatihan mengenai metode riset dalam penggunaan data-data sekunder mengenai konflik kekerasan tersebut untuk studi-studi mengenai konflik, kekerasan dan perdamaian di Indonesia.

Terakhir, mewakili segenap pengurus APSSI saya mengucapkan terima kasih sebesar-besar kepada para peserta Konferensi Nasional Sosiologi 1 APSSI di Palembang, baik kepada para pemakalah, moderator maupun peserta aktif, yang telah membuat perhelatan tersebut menjadi sebuah acara ilmiah yang berkualitas dan bereputasi tinggi. Tak kalah pentingnya, kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Panitia Penyelenggara Konferensi Nasional APSSI, dalam hal ini program Pasca Sarjana Sosiologi Universitas Sriwijaya, Palembang, khususnya Dr. M. Ridhah Taqwa dan tim, yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan tersebut sehingga bisa berjalan dengan lancar dan sukses.

Akhirul kalam, semoga Konferensi Nasional Sosiologi I APSSI di Palembang pada 23-25 April 2013 menjadi salah satu sumbangan dari penggiat program studi sosiologi di Indonesia bagi transformasi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih damai, bermartabat dan berkeadilan.

Salam Hormat,
Ketua Umum APSSI

Dr. Muhammad Najib Azca, MA

Daftar Isi

Kata Pengantar v

Kata Sambutan ix

Daftar Isi xiii

Keynote Speech : DR. (HC). Sri Sultan Hamengku Buwono X xv

Kecerdasan Sosial Dalam Mengelola Konflik

A. KONFLIK INDUSTRIAL

1. Konflik Komunitas dan Koporat di Wilayah Operasi Industry Energi: Pelajaran dari kasus perusahaan energi di wilayah di Jawa Barat (Indonesia) dan di wilayah Delta (Nigeria) 1

   Sulastri, *Departemen Sosiologi UI*

2. Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Kasus Lumpur Lapindo 19

   Dr. Anis Farida, *Universitas Wijaya Kesuma*

3. Konflik Hubungan Industrial: Suatu Kajian Pasar Kerja Fleksibel di Perguruan Tinggi 29

   Vieronica Varbi Sununianti, *FISIP UNSRI*

4. Dinamika Konflik dan Perlawanan Petani Rengas Versus PTPN VII Cinta Manis 65

   Abdel Kholik, *(LSM)*

5. 'Cultural Conflict' Masyarakat Agraris dalam Industri Pabrik Semen Tonasa di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan 87

   Dr. Syamsu A. Kamaruddin, M.Si, *FKIP Universitas Veteran RI Makassar*

6. Perspektif Laten dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis PNPM 101

   Muhammad Hayat, *Jurusan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang*

7. Perubahan Sosial Masyarakat Pasca Sengketa Tanah Pertanian di Desa Rengas Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir 115

Ir. M. Yazid, M.Sc., Ph.D, Chi-chi Novitasari & Ir. Julian Junaidi, M.Si, ***Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya***

8. Konflik Masyarakat dan Perusahaan Perkebunan Serta Alternatif Penyelesaiannya di Kabupaten Rokan Hulu 127

Drs. H. Basri, M.Si & Drs. H. Nurhamlin, MS, ***Dosen Sosiologi, FISIPOL Universitas Riau***

B. KONFLIK POLITIK & DEMOKRATISASI

9. Konflik Politik: Natur Masyarakat dan Kekuasaan 145

Novri Susan, ***Sosiologi Universitas Airlangga Surabaya***

10. Belajar Dari Konflik dan Damai Aceh 159

Dr. M Nazaruddin, ***Prodi Sosiologi Fisip Unimal Lhokseumawe***

11. Pro-Kontra Kebijakan Relokasi Korban Erupsi Merapi Studi Kasus: Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman DIY dan Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah 167

Suryo Adi Pramono ***Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta***

12. Model Analisis Konflik Politik lokal - Pemilu Kada: Suatu Perspektif Teoritis 223

Dr. M. Ridhah Taqwa, ***S2 Sosiologi Fisip Unsri***

13. Resolusi Konflik Pilkades Melalui Pendekatan Kultural (Studi Kasus di Kabupaten Purbalingga) 235

Sulyana Dadan, S.Sos., M.A & Dra. Sotyana Wardhiana, M.Kes, Jurusan Sosiologi FISIP INSOED Purwokerto

14. Maraknya Konflik Sosial Antar Warga (Desa) dan Upaya Penanganannya 249

Roslinawaty, Program Studi Sosiologi Universitas Tadulako

MODEL ANALISIS KONFLIK POLITIK LOKAL-PEMILUKADA
Suatu Perspektif Teoritis

Oleh DR. M. Ridhah Taqwa
Program Studi S2 Sosiologi Fisip Universitas Sriwijaya
Email: ridhotaqwa@gmail.com

Kode Fakultas 0 8 | Kode PS/Bagian 0 | Kode Publikasi 2 0 9 | Kode Penulis 0 1 | Tahun Publikasi 1 3 | Kode Sumber Tulisan 0 2 | Nomor urut Publikasi dari Fakultas 0 2 7 4

ABSTRAK

Era reformasi yang telah berlangsung selama 12 tahun, selain menghadirkan kebebasan politik, sekaligus juga menghadirkan konflik politik dan kekerasan di berbagai daerah. Konflik politik memiliki arti penting untuk mengukur atau mengevaluasi praktik demokrasi. Karena itu, diperlukan model analisis konflik politik pada aras local, khususnya melalui Pemilukada. Model analisis konflik pada intinya menjelaskan tentang seting konflik, proses konflik dan implikasinya. Seting konflik meliputi pihak-pihak yang berada di arena konflik, kepentingan, kebutuhan dan tujuannya, sedangkan proses koflik terutama menjelaskan intensitas, keluasan dan ketampakan konflik. Implikasi konflik tidak hanya bagi elit politik tetapi juga bagi massa, tidak hanya dampak yang bersifat sementara, tetapi juga jangka panjang.

Kata Kunci: konflik politik, seting konflik, intensitas konflik, implikasi konflik

Pengantar

Selama era reformasi yang sudah menginjak usia 15 tahun, ada banyak fenomena politik yang menarik dan penting untuk dicermati di Indonesia. Fenomena kebebasan politik telah memberi ruang bagi terbentuknya daerah otonom baru yang bertumbuh secara signifikan, pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, serta meluasnya konflik politik dan atau kekerasan politik yang mengiringi peristiwa atau momen politik tersebut.[1]

Fenomena politik yang menarik dicermati dari sisi otonomi daerah ini adalah semakin banyaknya jumlah kabupaten dan kota serta propinsi yang telah dimekarkan dari induknya. Pada awal reformasi ada sekitar 300 kabupaten dan kota, kini jumlahnya sudah mencapai 450 kabupaten/

[1] Sejumlah kekerasan politik yang cukup mengenaskan antara lain meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Utara, H Abdul Aziz Angkat dalam aksi unjukrasa anarkis di gedung DPRD Sumut, Medan, Selasa 3 Pebruari 2009 dan yang terakhir Peristiwa Kerusuhan pasca Pemilukada Kota Palopo Suwesi Selatan yang menyebabkan sejumlah Fasilitas Pemerintah dibakar oleh massa pada tgl 31 Maret 2013.

kota. Selain itu jumlah propinsi juga bertambah dari 27 (termasuk Timor Timur) pada era Orde Baru menjadi 34 propinsi di era reformasi. Bahkan masih ada puluhan usulan pemekaran kabupaten dan kota serta propinsi yang sedang diusulkan atau diproses oleh pemerintah pusat dan daerah. Penambahan jumlah daerah otonom secara signifikan tersebut, memiliki arti penting bagi perjalanan kita sebagai negara bangsa (nation state). Karena itu, penting pula untuk kita cermati bagaimana fenomena praktik demokrasi yang telah berlangsung selama lebih dari 12 tahun era reformasi di seluruh tanah air. Salah satu fenomena yang menyertai proses reformasi politik tersebut adalah konflik politik pada aras local (daerah).

Konflik politik bisa menjadi cerminan praktik demokrasi pada aras local, karena pada umumnya proses berlangsungmya sebuah konflik berada dalam konteks proses demokrasi, baik dalam proses politik pada tataran elit politik maupun proses politik yang melibatkan massa, seperti pemilihan umum atau pilkada. Melalui cermin praktik demokrasi itu kita dapat mengevaluasi sejauh mana masyarakat, terutama elit lokalnya memiliki kesiapan dan kematangan dalam membangun relasi-relasi kekuasaan antara satu dengan yang lain. Analisis konflik memiliki arti penting untuk menata mekanisme demokrasi di tanah air kita yang dari hari ke hari menunjukkan intensitas konflik politik. Selain intensitas konflik, dimensi keluasan dan ketampakan juga semakin menunjukkan gejala dan kecenderungan yang menarik sejak kita memasuki era reformasi. Dalam konteks reformasi, khususnya dalam konteks keterbukaan dan kebebasan itulah yang menjadi acuan analisis konflik politik local.

Ada beberapa kasus yang patut menjadi cermin dari praktik demokrasi local yangb kemudian mengahdirkan tragedoi kemanusiaan, seperti kematian Ketua DPRD Sumatera utara beberapa tahun yang lalu yang dipicu oleh konflik politik elit dengan massa. Selain itu beberapa Pilkada yang mengalami kericuhan sejak proses pencalonan sampai penetapan pemenang juga terjadi di sejumlah daerah, baik di kawasan barat Indonesia maupun di kawasan timur. Oleh karena itu model analisis konflik politik para aras local akan diletakkan pada konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pokok permasalahan yang akan dianalis mencakup seting konflik dan proses konflik. Seting konflik bermaksud akan memetakan pihak-pihak terkait yang berada di arana konflik dan kepentingannya. Sedangkan dalam konteks proses konflik akan mencakup intensitas, keluasan dan ketampakan konflik, serta yang tidak kalah pentingnya adalah dimensi implikasi dari sebuah konflik politik bagi masyarakat luas.

Kerangka Teoritik

Para teoritikus ilmu sosial memiliki pandangan yang berbeda dalam menjelaskan fenomena konflik, tetapi secara umum konflik diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu-kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.[2] Sasaran tersebut mencakup semua aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik. Lebih tegas lagi Mack, Snyder dan Gurr merumuskan ada 4 syarat atau indikator konflik, yaitu: (1) Terdapat dua atau lebih pihak yang berkonflik; (2). Pihak-pihak tersebut saling tarik-menarik dalam aksi saling memusuhi (*mutually opposing actions*); (3) Cenderung berperilaku koersif untuk memusuhi dan menghancurkan musuh; (4). Adanya ketegasan sikap masing-masing pihak, sehingga dapat terdeteksi pihak lain di luar arena konflik.[3]

Ada beberapa alat analisis untuk memahami fenomena konflik, selain dengan melihat tahapan konflik, juga dengan melihat posisi, kepentingan dan kebutuhan pihak yang berkonflik.[4] Dari segi tahapan terutama melihat pasang surut konflik mulai dari pra kondisi, komprontasi, masa krisis dan akibat sampai pasca konflik. Selanjutnya dengan pemetaan sebagai instrumen analisis konflik, akan diketahui pihak-pihak utama yang ada dalam arena konflik, berikut dengan posisinya, kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak. Model analisis seperti ini biasanya disebut analogi *Bawang Bombay*.[5]

Karena konflik politik senantiasa mengalami pasang surut sesuai dengan momen politik dan kepentingan politik yang menyertainya, seperti rekrutmen elit lokal melalui Pilkada. Proses politik seperti itu sarat dengan benturan kepentingan antar berbagai pihak, sehingga tidak mengherankan jika konflik politik memiliki struktur konflik atau adanya sejumlah pihak yang berlatar belakang sosial ekonomi politik yang berbeda kepentingannya bermain di dalam arena tersebut. Bersama dengan itu konflik pun mempunyai keluasan, ketampakan dan intensitas yang berbeda-beda, baik dari segi waktu (momen politik) atau situasi sosial politik tertentu, seperti pada musim pilkada.

---

[2] Lihat Simon Fisher, dkk. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. British Council-RTC. Jakarta, 2000: hal. 4.

[3] Lihat Fatah. *Manajemen Konflik Politik dan Demokrasi*. Prisma no. 8, Agustus 1994; 47.

[4] Lihat S. Fisher dkk. op.cit. hal. 19-20.

[5] Ibid.

Konsep-konsep yang menjadi acuan analisis ini, sebagian telah dirumuskan oleh teoritikus ilmu sosial, antara lain Dahrendorf, Gobb dan Elder. Menurut Dahrendorf Intensitas konflik menunjuk pada pengeluaran energi dan tingkat keterlibatan oleh pihak yang berkonflik, sedang kekerasan konflik menunjuk pada alat yang digunakan oleh pihak-pihak yang saling bertentangan untuk mengejar kepentingannya.[6] Selanjutnya Cobb dan Elder merumuskan dimensi konflik yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu keluasan, intensitas dan ketampakannya.[7] Keluasan konflik menunjuk pada jumlah orang atau kelompok yang terlibat dalam konflik dan skala konflik, sedang intensitas konflik menunjuk pada sempit-luasnya komitmen sosial yang bisa terbangun akibat sebuah konflik. Jika konflik intensitasnya tinggi, maka komitmen sosial yang terbangun menjadi meluas dan konflik pun semakin berkembang. Dimensi ketampakan konflik menunjuk pada tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat, di luar pihak yang berkonflik tentang peristiwa konflik. Konflik yang memiliki ketampakan tinggi adalah konflik yang disadari dan diketahui secara meluas dan mendalam oleh masyarakat.

Dimensi konflik di atas selanjutnya akan dijadikan sebagai instrumen analisis untuk memahami percaturan politik lokal yang juga melibatkan elit nasional. Arena suksesi gubernur atau bupati misalnya diasumsikan sarat dengan konflik kepentingan antara berbagai pihak, baik internal masyarakat, maupun antar organisasi sosial politik, pemerintah dan atau kalangan militer, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten kota. Suksesi politik di berbagai daerah juga ditandai dengan keterlibatan elit poltik nasional, terutama dari organisasi politik dan para anggota dewan. Kemenangan pasangan Bibiet Waluyo dan Rustriningsih di Propinsi Jawah Tengah misalnya, tidak terlepas dari intervensi elit nasional partai sebagaimana telah menjadi garis kebijakan politik PDIP.[8]

Konflik politik dalam masyarakat, biasanya lebih banyak diperankan oleh kalangan elit politik, dari pada partisipasi masyarakat. Karena itu pula konsep elit politik (lokal) penting dirumuskan dalam konteks kajian ini. Elit politik tidak hanya bagi mereka yang memiliki kedudukan politik, tetapi semua orang atau kelompok yang karena

---

[6] Dahrendorf menggunakan konsep kekerasan terbuka. Dalam Johnson, 1986. *Teori Sosiologi Klasik-Modern, Jilid II*. Terjemahan Robert M.Z. Lawang. Gramedia, Jakarta: hal. 189.

[7] E.S. Fatah, op.cit., hal. 49.

[8] Lihat Annual Report 2001-2002, *Desentralisasi dan Demokrasi Lokal*. IRE, Yoyakarta, 2002: 67-70.

memiliki sumber daya lebih dan mampu mempengaruhi keputusan politik pada semua aspek kehidupan.[9] Elit lokal menunjuk pada elit politik yang diakai dan atau berlaku pada tingkat lokal yang kemudian berpengaruh atau mempengaruhi proses politik. Dengan demikian elit politik lokal berarti elit yang berpengaruh dalam proses politik hanya pada aras lokal, karena kelebihannya, baik dari segi ilmu pengetahuan, pendidikan, status sosial, dan dihormati oleh masyarakat setempat.[10]

Atas dasar rumusan tersebut, maka untuk menentukan kategori elit lokal akan diidentifikasi dengan 3 (tiga) ciri berikut. *Pertama*, mereka yang karena kedudukan atau posisinya dalam struktur organisasi pemerintahan lokal dan organisasi sosial. *Kedua*, bagi mereka yang memiliki reputasi, misalnya karena merupakan tokoh agama atau intelektual yang dihormati. *Ketiga*, terhadap mereka yang mampu mempengaruhi keputusan politik lokal, dan juga karena memiliki jaringan yang luas, baik terhadap birokrasi maupun militer. Jadi mereka yang berasal dari kalangan ulama dan pengusaha juga menjadi bagian dari elit politik local jika mereka berpartisipasi dan percaturan politik melalui pilkada.

Dari uraian teori-teori konflik di atas dapat dirumuskan ruang lingkup analisis konflik, yaitu seting konflik yang meliputi posisi pihak yang berkonflik, kepentingan dan kebutuhan atau tujuannya. Analisis kemudian dipertajam dengan menguraikan proses konflik yang meliputi keluasan, intensitas, ketampakan konflik politik, serta implikasinya bagi perkembangan demokrasi pada aras lokal. Dari sisi seting kemudian pihak yang berkonflik mengembangkan isu-isu politik seperti identitas budaya, dan isu tersebut bersifat dinamis mengikuti proses konflik.

Selanjutnya model analisis konflik politik lokal dalam suksesi elit lokal (gubernur-bupati-walikota) dan implikasinya bagi demokrasi pada aras lokal digambarkan dalam bentuk skema berikut :

---

[9] Lihat S.M. Lipset. *The Encyclopedia of Democracy.* Vol. 1, hal. 426-428.

[10] Lihat S. Usman, *Pengaruh dan Jaringan Interaksi Elit Lokal dalam Pembangunan.* Prospektif, Vol. 2, No. 4, 1990, dan Mappawata, *Hubungan Patron Client.* Jurnal Tamalanrea, Edisi pertama.

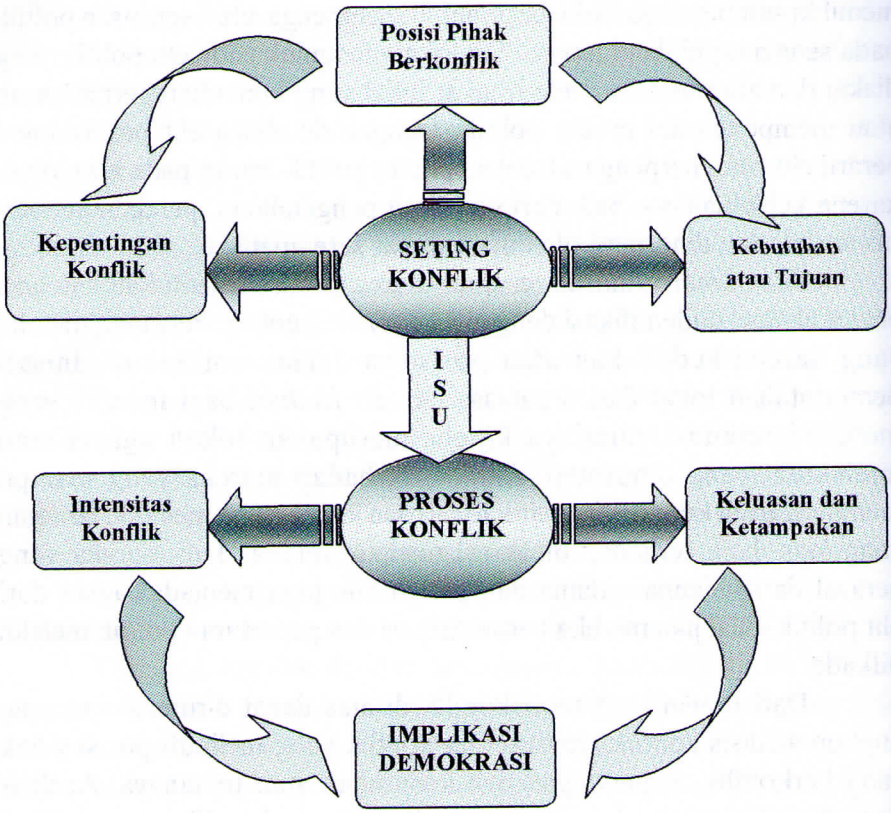

Gambar 1. Skema kerangka pemikiran Analisis

Pihak yang berkonflik tidak hanya terbatas pada suatu pihak (aktor/kelompok) dengan pihak lain (aktor/kelompok), tetapi semua individu (elit) atau kelompok yang memposisikan diri sebagai salah satu pihak dalam konflik politik itu. Kepentingan yang dimaksud lebih ditekankan pada *reward* yang akan diperoleh jika salah satu pihak memenangkan konflik seperti kedudukan politik dan peluang usaha yang lebih baik. Sedangkan kebutuhan menunjuk pada tujuan yang ideal misalnya berkembangnya demokrasi (supremasi sipil), peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan, serta peningkatan pelayanan publik dan mutu pendidikan. Dari tujuan ideal dan kepentingan ini kemudian dikemas menjadi isu-isu politik dari kedua belah pihak yang berkonflik. Isu-isu politik ini berkembang terus untuk memperkuat posisi masing-masing seiring dengan intensitas, ketampakan dan keluasan konflik.

Keterkaitan antara elit poltik nasional dan lokal dan massa dalam percaturan politik pada aras local juga berfungsi untuk melihat luas, intensitas dan ketampakan konflik. Sejauh mana pihak yang saling berlawanan melibatkan atau didukung oleh massa dan elit politik nasional, khususnya dari kalangan partai. Dalam situasi ini yang kemudian perpotensi menghadirkan tindak kekerasan oleh massa. Keluasan konflik juga berkaitan dengan intensitas yang menujuk pada komitmen yang terbangun sebagai akibat konflik. Jika komitmen semakin meluas maka ketampakan konflik pun semakin nyata bagi masyarakat (konflik manifest). Dengan komitmen yang mendalam itu memungkinkan terjadinya perubahan seting konflik, karena pihak yang berkonflik berusaha mencari titik temu dengan pihak tertentu untuk kemudian bergabung menghadapi pihak lain. Pada saat bersamaan, relasi sosial ekonomi tersebut membuka jalan terbentuknya konsistensi konflik, seperti karena kedekatan identitas sosial budaya (kerabat) dan usaha ekonomi (kolusi). Konsep konsistensi konflik merujuk pada teori Dahrendorf bahwa anggota kelompok atau pihak yang berkonflik saling berkomprontasi dalam macam-macam asosiasional, dan energi yang dikeluarkan disatukan dalam asosiasi untuk menghadapi pihak lain.[11]

Implikasi atau dampak konflik merupakan salah satu aspek yang penting untuk mengalisis konflik politik. Jika sebuah konflik intensitasnya tinggi, selain konflik itu rawan menjadi arena kekerasan, juga berpotensi menjadi konflik yang berkepanjangan. Konflik tidak hanya terjadi dalam proses pilkada tetapi bisa berlangsung lama, bahkan selama satu periode kepemimpinan bupati atau gubernur. Konflik berkepanjangan pernah terjadi di Maluku Utara, ketika pemilihan Gubernur di propinsi yang baru dimekarkan dari Propinsi Maluku digugat hasilnya oleh pihak yang kalah suara. Ketika itu, konflik elit politik antara dua kandidat kuat, yaitu Taif Armaen dan dr Abdul Gafur juga melibatkan massa. Hal yang sama terjadi pada Pemilukada Propinsi Papua dimana konflik berlangsung dalam waktu yang lama (2012-2013), karena penetapan pasangan terpilih mengalami gugatan yang prosesnya memamakan waktu lama.

---

[11] R. Dahrendorf. *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisa-Kritik.* Cet. I, Rajawali Pers. JaPkarta. 1986. hal. 190.

Gambar 2. Ketua DPRD Sumatera Utara yang mengalami tindak kekerasan oleh massa

Gambar 3. Fasilitas pemerintah yang terbakar pasca penetapa hasil Pemilukada di Palopo

Selain itu potensi konflik antara bupati atau gubernur dengan anggota dewan yang juga kalah dalam pilkada, juga berpeluang terjadi pada aras local, Hal ini terutama akan menjadi potensi konflik ketika keduanya masih menduduki jabatannya, karena dengan jabatan itu bisa menjadi modal sosial ekonomi untuk saling berhadapan dalam memperbutkan pengaruh dan tawar menawar politik. Implikasinya, proses politik akan alot dan keduanya akan memiliki posisi tawar yang seimbang. Namun diisi lai juga bisa memperkuat control atau pengawasan terhadap lembaga eksekutif di daerah. Implikasi lainnya, konflik politik pilkada dalam suatu waktu pemilihan, bisa menjadi pembelajaran pada pemilihan berikutnya. Jika pihak yang berkompetisi bisa mengambil pembelajaran yang cerdas dari pengalaman masa lalunya, maka mereka akan

menghindari terjadinya konflik. Namun jika pihak yang berada dan arena Pilkada itu justru mengambil pembelajaran yang disertai rasa dendam, maka arena itu pun akan menjadi arena balas dendam, sehingga semakin meningkat intensitas, keluas dan ketampakan konflik politik. Karena itu, penting bagi kita sebagai bangsa yang sedang menata proses demokrasi politiknya senantiasa mengambil pelajaran yang cerdas dan penuh kearifan dari proses politik yang telah menimbulkan konflik, apalagi disertai dengan kekerasan yang mengancam jiwa manusia.

Implikasi dari praktik demokrasi politik melalui pemilihan langsung selama lebih dari satu dekade ini, memang sudah saatnya dievalusi. Hasil evalusi tersebut dapat menjadi masukan bagi perbaikan perangkat perundang-undangan politik yang sekarang ini sedang digodok oleh pemerintah. Pemilihan kepala daerah secara langsung, kini mulai digugat terutama karena berimplikasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan praktik korupsi yang masih marak diberbagai daerah. Selain itu, karena benturan massa yang kemudian melahirkan tindak kekerasan bahn kornan jiwa. Bahkan tidak sedikit diantaranya yang menimbulkan kerusakan fasilitas publik. Dengan demikian, diharapkan model analisis ini dapat berkontribusi bagi perbaikan demokrasi kita ke depan, baik pemilihan langsung maupun tidak langsung.

Catatan Akhir

Model analisis konflik ini memiliki arti penting dalam rangka memahami fenomena politik, khususnya dari kacamata sosiologi politik. Dengan model analisis ini tidak hanya dapat dipergunakan oleh para peneliti dan aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tetapi juga oleh para aktifis politik itu sendiri. Tujuannya untuk mengukur peluang kemenangan, sekaligus untuk memperhitungkan potensi konflik yang mungkin terjadi dalam suatu percaturan politik. Selain itu hasil analisis seperti ini juga bisa bermanfaat dalam rangka melihat dan mengantisipasi implikasi dari segala kemungkinan yang akan terjadi jika terjadi konflik dengan intesitas tinggi. Dalam situasi ini yang kemudian seringkali berlanjut pada tindak kekerasan atau kerusahan. Hal ini penting dimaknai, karena dalam suatu arena konflik seringkali ada pihak yang menumpang kepentingan dalam situasi konflik politik. Penumpang kepentingan itu bisa bermotif ekonomi, bisa pula bermotif politik, atau bahkan bermotif kedua-duanya. Penumpang kepentingan konflik ini bisa memanfaatkan situasi, sehingga ia bisa mengambil peran strategis, sekaligus akan mendapatkan keuntungan ekonomi.

Dengan adanya model analisis ini diharapkan para peneliti sosial dan politik memiliki kemampuan dan kecakapan untuk melakukan analisis terhadap fenomena kekuasaan yang memang tidak mudah untuk dianalisis karena akan banyak actor yang bermain di dalamnya. Starteginya bisa dengan memilih model analisis yang sangat sederhana, misalnya seting konflik politik saja. Hal ini sudah cukup memadai untuk mengukur potensi dan intensitas secara dini. Yang pokok dari semua itu adalah kita berharap konflik politik dalam percaturan politik pada era reformasi bisa diminimalisir peluang dan implikasinya, sehingga praktik demokrasi di tanah air kita semakin sejalan dengan spirit demokrasi Pancasila.***

DAFTAR PUSTAKA

Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisa-Kritik.* Cet. I, Rajawali Pers. Jakarta.

Fatah, R. Eef Saefulloh. 1994. *Manajemen Konflik Politik dan Demokrasi.* Prisma, No. 8, Agustus 1994. Jakarta.

Fisher, Simon. dkk. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak.* Penyunting S.N. Kartikasari. Zed Books dan The British Council. London.

Gibbons, M.T. 2002. *Tafsir Politik: Telaah Hermeneutis, Wacana Sosial Politik Kontemporer*. Qalam, Yogyakarta.

Kammen, Douglas. 2001. *Pilkades: Democracy, Village Election and Protest In Indonesia.* Jurnal Renai Th. I, No. 2, April-Mei 2001.

Kotler-Berkewitz, Laurence A. 2001. *Religion and Voting Behavior in Great Britain: A Reassessment.* The British Journal of Political Science. Vol 31, Page 523-554. Cambridge University Press.

Kristiadi, J. 1996. *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia.* Prisma, No. 3, hal. 73-91.

Lipset, Seymour Martin. 1995. *The Encyclopedia of Democracy.* Volume III dan IV: Congressional Quarterly, Washington, D.C.

Malley, Michael. 2001. *Conflict, Reform, and Regional Political Leadership.* Renai, Jurnal Politik Lokal dan Sosial Humaniora. Tahun 1, No. 3. Juli-September. Hal. 34-54.

Mulkhan, Abd. Munir. 1989. *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Ummat Islam, 1965-1987.* Rajawali Press, Jakarta.

Najib, Emha A. 2009. *Demokrasi La Roiba Fih.* Kompas. Jakarta.

Putra, Heddy S. Ahimsa. 1988. *Minawang: Hubungan Patron-Klien di*

Sulawesi Selatan. Gama University Press. Yogyakarta.

Piliang, Yasraf A. 2009. *Transpolitika: Dinamika Politik di dalam Virtualitas*. Jalasutra. Yogyakarta dan Bandung.

Taqwa, Ridhah. 2010. *Demokrasi Berbisik dan Bisikan Demokrasi dalam Rekruitmen Elit Lokal*. Dalam Buku Sulawesi Selatan. KAMPS, Yogyakarta.

Taqwa, M. Ridhah. 2004. *Perilaku Memilih dan Politik Kepartaian pada Pemilu 1999, Penelitian Di Desa Pinang Kab. Enrekang Sul-Sel.* Sosiosains, Vol. 17, Nomer 3, Juli 2004.

Usman, Sunyoto. 1990. *Pengaruh dan Jaringan Interaksi Elit Lokal dalam Pembangunan*. Prospektif, Vol. 2, No. 4. Yogyakarta.

————. *Annual Report 2001-2002: Desentralisasi dan Demokrasi Lokal.* IRE, Yoyakarta, 2002: 67-70.